



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-68.KP.03.04 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor C 26-30/KOL 32-4/04 tanggal 17 September 2020 hal Pertimbangan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian An. Muslim Nasution, S.H., dkk., Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi angka kredit kumulatif minimal dan direkomendasikan dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jenjang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Pertama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Pertama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor B/365/M.SM.02.03/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Pemberlakuan Pengaturan Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



MOHAMMAD HAYAT HENRI  
NIR.H.196101291985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
7. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.2-68.KP.03.04 TAHUN 2020

TANGGAL : 22 Desember 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL./RUANG)	JABATAN BARU		ANGKA KREDIT
1.	MUSLIM NASUTION, S.H. NIP. 199207282019061001	Penata Muda (III/a)	4	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara	102,000
2.	ONGKI, S.H. NIP. 199102092019011001	Penata Muda (III/a)		Analisis Kepegawaian Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua	102,000
3.	ESTER LEBRINA LAYAN, S.H. NIP. 199401012019012002	Penata Muda (III/a)		Analisis Kepegawaian Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua	102,000
4.	REGINA EDOWAY, S.H. NIP. 199305072019012001	Penata Muda (III/a)		Analisis Kepegawaian Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat	102,000
5.	ROSALIN SABAMI, S.H. NIP. 198804042019012001	Penata Muda (III/a)		Analisis Kepegawaian Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara	102,000
6.	EEN LABERMA, S.H. NIP. 199108312019061001	Penata Muda (III/a)		Analisis Kepegawaian Ahli Pertama pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara	102,000
7.	FADILAH, S.H. NIP. 199111262019012001	Penata Muda (III/a)		Analisis Kepegawaian Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	102,000
8.	AHMAD RIZAL, S.H. NIP. 199504172019011001	Penata Muda (III/a)		Analisis Kepegawaian Ahli Pertama pada Balai Harta Peninggalan Makassar	102,000



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

